

RESPON SELANDIA BARU TERHADAP PENDEKATAN TIONGKOK DI OCEANIA TAHUN 2014-2019

Oleh : **Cattleya Liutantri**

email: cattleyaliu88@gmail.com

Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel

Bibliografi : 6 Buku, 9 Dokumen, 16 Jurnal, 17 Website, 15 Media Online

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research analysed New Zealand's responses towards China's geopolitical approach in Oceania particularly in the year of 2014 until 2019. China, who is intensifying its approach to countries in Oceania, is creating political problems for New Zealand. These political problems consist of the disruption of New Zealand's interests. As a small country, New Zealand has its own strategy in response to China's approach. New Zealand employs its hedging strategy in the spectrum of economic pragmatism where New Zealand seeks to meet its interests without causing significant damage.

This research is conducted by using the descriptive qualitative method with document analysis as its data collecting method. Document analysis is done by evaluating documents such as books, journals, press releases, news, and government publications. This research used the Neorealism perspective and hedging theory. This theory explains countries' response of hedging toward political problems.

This paper showed that, in accordance with the hedging theory, New Zealand's response to its political problem towards China is by maximizing its economic benefits using economic pragmatism strategy. This strategy can be seen from some of New Zealand's actions such as Joint Statement between New Zealand and the People's Republic of China on the Establishment of a Comprehensive Strategic Partnership, signing of Belt and Road Initiative's MoA, and renewal of FTA between China and New Zealand. New Zealand's actions show its intentions towards continuing its economic relation with China in the future. Therefore, it can be seen that with regard to its political problems with China, New Zealand chooses to defend its economic interests.

Keywords: *Hedging, Economic Pragmatism, China's Geopolitical Approach, New Zealand's Interest.*

PENDAHULUAN

Pendekatan Tiongkok ke wilayah Oceania dimulai pada tahun 2000 yang ditandai dengan diumumkannya pendirian *China-Pacific Island Forum Cooperation Fund* dan dibukanya *Pacific Islands Forum Trade Office* di Beijing.¹ Pada saat itu, Tiongkok memulai strategi diplomasi pemulihan hubungan dengan negara tetangganya dan membangun atau membangun kembali hubungan diplomatik. Pengaruh Tiongkok yang terus berkembang melalui strategi ini, meluas hingga ke wilayah Oceania terutama ke negara-negara Pasifik Selatan. Sejak akhir tahun 1990an, hubungan antara Tiongkok dan negara-negara di Oceania telah berkembang pesat. Hubungan diplomatis, ekonomi dan budaya antara Tiongkok dengan negara-negara seperti Fiji, Papua Nugini, Tonga dan Vanuatu berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan resmi dan bantuan keuangan (untuk meningkatkan perdagangan, pembangunan infrastruktur, memperlengkapi aset pemerintah dan militer, serta pengembangan) oleh Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bantuan keuangan Tiongkok di Oceania. Tiongkok banyak memberikan bantuan keuangan dalam beberapa proyek infrastruktur besar di seluruh wilayah ini. Hal ini termasuk bantuan dana 2 juta dolar dalam proyek pembangunan fasilitas olahraga serbaguna di Fiji dan 5,5 juta dolar untuk kompleks olahraga nasional di Kiribati.

Pada Oktober 2021, pemerintah Tiongkok mengumumkan pembangunan Pusat Kerjasama Perubahan Iklim Tiongkok-Pasifik, Pusat Kerjasama Pembangunan dan Pengurangan Kemiskinan dan sebuah cadangan pasokan darurat.² Tiongkok juga memberikan

bantuan pada Tonga setelah terjadinya erupsi gunung merapi dan tsunami pada Januari 2021. Tiongkok memberikan lima gelombang bantuan kepada Tonga yang meliputi barang-barang senilai US\$44.000 dari Kedutaan Besar Tiongkok di Tonga, US\$100.000 dari Palang Merah Tiongkok, US\$158.000 dalam bentuk barang dari Kedutaan Besar Tiongkok di Fiji dan bantuan senilai US\$3,16 juta.³ Tidak hanya dengan Tonga, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan interaksinya dengan Pulau Solomon. Tiongkok mengirim tim yang terdiri dari sembilan penasehat polisi ke Kepolisian Kepulauan Solomon pasca kerusuhan pada November 2021. Bahkan pada bulan Mei 2022, Tiongkok dan Pulau Solomon menandatangani perjanjian keamanan dengan jangka waktu minimal lima tahun.

Pendekatan Tiongkok ke Oceania tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan. Tiongkok sendiri memiliki kepentingan dalam langkahnya untuk mendekati diri ini. Jika dilihat dari sisi politik, pendekatan Tiongkok di wilayah ini dapat dikatakan sebagai upayanya untuk mengimbangi pengaruh Taiwan. Kompetisi antara Tiongkok dan Taiwan sudah berlangsung sejak tahun 1970an, terutama setelah Taiwan gagal mendapatkan keanggotaan di PBB dan mulai mencari pengakuan diplomatis dimana-mana.⁴ Untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruhnya, Tiongkok memanfaatkan kemampuan ekonominya dalam bentuk bantuan dana dan investasi. Selain alasan kompetisi, Tiongkok juga memiliki kepentingan politik lain di Oceania. Dalam pidatonya di Fiji tahun 2006, Wen Jiabao menekankan bahwa niat Tiongkok untuk bekerja sama dengan negara Kepulauan Pasifik bukanlah untuk manfaat diplomatik,

¹ Terence Wesley-Smith, "China's Rise in Oceania: Issues and Perspectives", *Pacific Affairs* 86, no. 2 (2013).

² Denghua Zhang, "US-China Rivalry Intensifies in The Pacific", *East Asia Forum*, 2022, <https://www.eastasiaforum.org/2022/04/16/us->

<china-rivalry-intensifies-in-the-pacific/>. Diakses 11 September 2022

³ Ibid.

⁴ Terence Wesley-Smith, "China's Rise in Oceania: Issues and Perspectives", *Pacific Affairs* 86, no. 2 (2013): 351-372, doi:10.5509/2013862351.

tetapi alasan strategis.⁵ Ada isu selain Taiwan dimana, Tiongkok berupaya untuk mencari dukungan dari negara-negara di Oceania terutama dalam organisasi internasional. Organisasi seperti PBB yang menjalankan sistem satu suara untuk satu negara membuat dukungan dari negara kecil, seperti negara Kepulauan Pasifik, berharga. Negara-negara di Oceania juga memiliki keanggotaan di beberapa organisasi internasional berpengaruh seperti ILO, *International Maritime Organization*, IMF, WHO, dan WTO. Seperti pada Mei 2005, Tiongkok meminta dukungan Vanuatu di PBB dan di minggu yang sama Beijing memberikan “dukungan budget” sejumlah \$1 juta pada Vanuatu.⁶ Sehingga, dari sisi politik, kepentingan dibalik pendekatan Tiongkok adalah untuk menyaingi pengaruh Taiwan di kawasan ini dan untuk mencari dukungan terutama dalam organisasi internasional.

Selain kepentingan politik, Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi di Oceania. Kepentingan ekonomi utama Tiongkok terhadap negara-negara Pasifik Selatan tidak terletak pada jual beli barang ataupun jasa. Dari interaksi Tiongkok dan Pasifik Selatan dapat dilihat bahwa dari sisi Pasifik Selatan, mereka ingin Tiongkok membantu dalam pembangunan infrastruktur mereka, sedangkan Tiongkok menginginkan hak atas SDA. Sebagai sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, Tiongkok membutuhkan jumlah sumber daya alam yang cukup besar untuk mendukung perekonomiannya. Beberapa SDA seperti

mineral, hidrokarbon, kayu, emas dan wilayah perikanan luas yang terdapat di Oceania merupakan sumber daya yang menarik perhatian Tiongkok. Tiongkok telah mengajukan beberapa proyek yang dilihat dapat menguntungkan kedua pihak. Dalam berbagai perjanjian penangkapan ikan, Tiongkok menyediakan dana untuk kapal, pabrik pengolahan, dan fasilitas, sebagai gantinya Tiongkok juga mendapatkan hak untuk menangkap ikan di ZEE wilayah ini.⁷ Tidak hanya itu, Tiongkok juga menunjukkan ketertarikan pada tambang nikel dan kobalt di Papua Nugini. Perusahaan Tiongkok, *Chinese Metallurgical Construction Corporaion*, membeli saham dalam jumlah besar pada proyek penambangan nikel dan kobalt Ramu di Madang, Papua Nugini.⁸ Pada tahun 2019 Tiongkok juga telah mengimpor produk makanan laut senilai \$100 juta dari wilayah Oceania.⁹ Menurut Laporan Departemen Pertanian AS, pada tahun 2020, Papua Nugini adalah pengeksport kayu keras terbesar ke Tiongkok, menyumbang 21% dari total impor Tiongkok, diikuti oleh Kepulauan Solomon.¹⁰ Selain SDA, Tiongkok juga memiliki kepentingan untuk mempromosikan BRI di wilayah Oceania. Kepentingan Tiongkok di wilayah ini didorong oleh perkembangan pesat dari ekonominya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pendekatan Tiongkok di Oceania didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi dari negaranya terutama ketika Tiongkok sedang berupaya untuk meningkatkan *power* negaranya.

⁵ "Win-Win Cooperation for Common Development", *Chinadaily*, 2006, http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/05/content_560611.htm. Diakses 2 Oktober 2022

⁶ Tamara Renee Shie, "Rising Chinese Influence in The South Pacific: Beijing's "Island Fever"", *Asian Survey* 47, no. 2 (2007): 307-326, doi:10.1525/as.2007.47.2.307.

⁷ Ibid. hlm. 321

⁸ Terence Wesley-Smith, "China's Rise in Oceania: Issues and Perspectives", *Pacific Affairs* 86, no. 2 (2013): 351-372, doi:10.5509/2013862351.

⁹ Wonchibeni Patton, "What Does China Gain from Its South Pacific Engagement?," *ICS Research Blog*, 26 November, 2021, <https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/>. Diakses 27 Maret 2023

¹⁰ *China: Imports Buoyed by Softwood Log Demand, China: Imports Buoyed by Softwood Log Demand* (Beijing, China: U.S. Department of Agriculture, 2021), hal. 2-9.

Selandia Baru adalah negara kedua terbesar setelah Australia di kawasan Oceania. Selain sebagai negara terbesar kedua, Selandia Baru juga memegang posisi sebagai rekan dagang yang penting bagi negara-negara Pasifik. Pada tahun 2018, perdagangan dua arah antara Selandia Baru dan negara-negara Pasifik bernilai NZD\$ 3,62 miliar.¹¹ Selandia Baru menjadi pengekspor susu, daging, mesin-mesin, kapal, dan besi bagi negara-negara seperti Fiji, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Samoa, dan Pulau Cook.¹² Tidak hanya dalam bidang ekonomi, Selandia Baru juga memiliki kepentingan keamanan di wilayah ini. Dalam hal keamanan, Selandia Baru merasa bahwa keamanan dari negara-negara Pasifik mempengaruhi keamanan domestik Selandia Baru. Selandia Baru sendiri menolak militerisasi wilayah Pasifik. Hal ini dapat dilihat dari respon Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, terhadap munculnya isu bahwa telah dilakukan persetujuan militer antara Tiongkok dan Vanuatu di tahun 2018. Ardern mengatakan *"But what I can say is that we, of course, keep a watching eye on activity within the Pacific and that New Zealand is opposed to the militarisation of the Pacific generally"*.¹³ Dari pernyataan Ardern ini dapat dikatakan bahwa Selandia Baru memperhatikan keamanan di wilayah Pasifik dan juga bahwa Selandia Baru tidak ingin Tiongkok membangun keberadaan militer di wilayah ini. Untuk mendukung kepentingan keamanan ini, badan-badan Selandia Baru, seperti Polisi, Bea Cukai dan Imigrasi, bekerja erat dengan rekan-rekan mereka di Pasifik untuk memperkuat keamanan perbatasan.¹⁴ Unit Kejahatan Transnasional Selandia Baru bekerja sama

dengan Pusat Koordinasi Kejahatan Transnasional Pasifik di Asia, dan mendukung Unit Kejahatan Transnasional Pasifik di Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue.¹⁵ Dengan begitu terlihat jelas keberadaan dan kepentingan Selandia Baru di wilayah Oceania ini. Selandia Baru sendiri telah melakukan pendekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Bentuk pendekatan yang dilakukan Selandia Baru berupa pendekatan historis dimana, Selandia Baru mempromosikan latar belakang identitas dan budaya negaranya yang serupa dengan negara-negara Pasifik Selatan. Namun, pendekatan Selandia Baru ini kalah dengan pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Pendekatan Tiongkok yang berupa bantuan finansial lebih disukai oleh negara-negara ini. Sehingga, dalam pendekatannya, Tiongkok telah mengeser preferensi negara-negara di Oceania. Pendekatan Tiongkok ini memberikan alternatif lain bagi negara Pasifik Selatan sehingga, mempersulit Selandia Baru untuk menggunakan bantuannya sebagai alat politik. Selain itu, pendekatan Tiongkok yang memiliki ideologi yang berbeda juga menghambat Selandia Baru dalam mempromosikan ideologinya.

Bagi Selandia Baru, pendekatan Tiongkok di Oceania ini memunculkan dilema pada kebijakan luar negerinya. Secara ideologi, Selandia Baru dan Tiongkok sangatlah berbeda. Hal ini juga secara jelas disebutkan dalam *Strategic Defence Policy Statement 2018* bahwa: *"Yet as China has integrated into the international order, it has not consistently adopted the governance and values championed by the order's traditional*

¹¹ "Trade And Economic Cooperation", *New Zealand Foreign Affairs and Trade*, <https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/our-aid-partnerships-in-the-pacific/trade-and-economic-cooperation/>. Diakses 23 Agustus 2022

¹² Ibid.

¹³ Fergus Hunter dan David Wroe, "New Zealand Opposed to Militarisation in The Pacific: Jacinda Ardern", *The Sydney Morning Herald*, 2018,

<https://www.smh.com.au/politics/federal/new-zealand-opposed-to-militarisation-in-the-pacific-jacinda-ardern-20180410-p4z8pa.html>. Diakses 27 September 2022.

¹⁴ "Regional Security", *New Zealand Foreign Affairs and Trade*, <https://www.mfat.govt.nz/en/peace-rights-and-security/international-security/regional-security/>. Diakses 23 Agustus 2022.

¹⁵ Ibid.

leaders. Both domestically and as a basis for international engagement, China holds views on human rights and freedom of information that stands in contrast to those that prevail in New Zealand."¹⁶

Selandia Baru sendiri pada dasarnya merupakan sekutu tradisional dari Australia dan Amerika Serikat yang didasari atas kesamaan ideologi demokrasi mereka. Namun, langkah-langkah dari pemerintah Tiongkok tidak selalu sejalan dengan ideologi yang dimiliki oleh Selandia Baru. Sudah banyak kasus pelanggaran HAM oleh Pemerintah Tiongkok, seperti fasilitas reedukasi di Xin Jiang yang melanggar HAM dari komunitas etnis Uyghurs. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga membatasi hak atas informasi warga Tiongkok melalui larangan penggunaan media sosial milik perusahaan non domestik. Namun, walaupun memiliki ideologi yang berbeda, Selandia Baru memiliki hubungan dagang yang erat dengan Tiongkok. Kepentingan ekonomi Selandia Baru terpaut erat dengan Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Selandia Baru. Saat ini, dalam perdagangan barang, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Selandia Baru dan terbesar kedua secara keseluruhan perdagangan jasa.¹⁷ Sejak tahun 2007, perdagangan dua arah telah meningkat dari NZ\$10 miliar menjadi NZ\$30 miliar.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dagang antara kedua negara ini telah memberikan keuntungan besar terhadap perekonomian Selandia Baru dan akan sulit bagi Selandia Baru untuk mencari pengganti Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa, jika hubungan antara kedua negara ini rusak maka, akan

sulit bagi Selandia Baru untuk memulihkan perekonomiannya.

Kedua kepentingan ini tidak bisa jalan beriringan karena menegakkan ideologi negara dapat merusak hubungan bilateral Selandia Baru dan Tiongkok, yang tentu saja akan berdampak pada hubungan dagang kedua negara ini. Dengan adanya dua kepentingan yang bertolak belakang ini, Selandia Baru dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Dalam kasus ini, respon Selandia Baru terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Oceania dapat mengimplikasi salah satu dari dua dilema Selandia Baru ini.

Pendekatan Tiongkok di Oceania juga memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan Selandia Baru. Walaupun Selandia Baru tidak pernah secara eksplisit menyatakan hal ini, kekhawatiran ini secara implisit disebutkan dalam beberapa kesempatan. Peter Winston, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, mengatakan bahwa militerisasi Pasifik merupakan salah satu kekhawatiran dari Selandia Baru dan bahwa terdapat beberapa pemain yang melakukan hal tertentu di Pasifik yang tidak baik untuk perdamaian dan keamanan jangka panjang dari Pasifik, atau untuk pertumbuhan demokrasi itu sendiri.¹⁹ Pemain besar yang terlibat di wilayah ini terdiri sekutu-sekutu Selandia Baru (Amerika Serikat, Australia dan Jepang) kecuali Tiongkok. Jadi, kecuali Selandia Baru khawatir akan aksi-aksi dari Amerika Serikat, Australia atau Jepang, Tiongkok adalah satu-satunya pilihan lain.²⁰ Jadi walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, dapat dilihat bahwa terdapat kekhawatiran dari Selandia Baru terkait perkembangan Tiongkok di Oceania. Dengan begitu dapat disimpulkan

¹⁶ Ministry of Defence of New Zealand, *Strategic Defence Policy Statement 2018* (Wellington: Ministry of Defence, 2018).

¹⁷ "China", *New Zealand Foreign Affairs and Trade*, [https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/asia/china/#:~:text=The%20New%20Zealand%E2%80%93China%20Free,billion%20to%20NZ\\$2430%20billion](https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/asia/china/#:~:text=The%20New%20Zealand%E2%80%93China%20Free,billion%20to%20NZ$2430%20billion), Diakses 3 Agustus 2022.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Iati Iati, "China's Impact on New Zealand Foreign Policy in The Pacific:", *The China Alternative*, 2021, 143-166, doi:10.2307/j.ctv1h45mkn.8.

²⁰ Ibid.

bahwa, Selandia Baru sendiri ingin mengembangkan perekonomiannya, namun khawatir akan perluasan pengaruh militer dan politik dari Tiongkok.

Sehingga, menarik untuk dianalisis mengenai strategi kebijakan luar negeri Selandia Baru dalam merespon pendekatan Tiongkok dimana, disaat yang bersamaan juga harus tetap memenuhi kepentingan nasional negara.

KERANGKA TEORI

Perspektif Neorealisme

Perspektif ini berfokus pada bagaimana dampak struktur internasional, yaitu distribusi kekuatan antara negara besar, terhadap kompetisi antar negara. Beberapa asumsi dasarnya adalah bahwa anarki internasional memunculkan perimbangan kekuatan, negara sebagai unit yang serupa memunculkan pengulangan dalam dunia internasional, kekuatan negara-negara yang tidak seimbang memunculkan konflik dan perang internasional, serta hubungan negara-negara besar memunculkan perubahan internasional.

Menurut perspektif neorealisme Waltz, fitur dasar dari hubungan internasional adalah struktur anarki yang terdesentralisasi antara negara-negara.²¹ Pada dasarnya, negara-negara di dunia beroperasi dengan cara yang sama walaupun memiliki budaya, ideologi dan sejarah yang berbeda. Semua negara mengumpulkan pajak, melaksanakan kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Yang membedakan negara-negara ini adalah kekuatan masing-masing negara yang beragam. Menurut Waltz, unit-unit negara dalam sistem internasional dibedakan terutama oleh kemampuan mereka yang lebih besar atau lebih kecil dalam melaksanakan tugas yang serupa ... struktur dari sistem berubah sejalan dengan

perubahan dalam distribusi kekuatan di seluruh unit sistem.²² Sehingga, dapat dikatakan bahwa perubahan dalam sistem internasional terjadi ketika naik atau turunnya kekuatan besar dan ketika *balance of power* berubah. Waltz membedakan dua sistem kekuatan, pertama sistem bipolar, seperti yang terjadi pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua sistem multipolar, seperti yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah Perang Dingin.²³ Waltz berpendapat bahwa sistem bipolar merupakan sistem yang lebih stabil sehingga memberikan jaminan keamanan dan perdamaian yang lebih baik dari pada sistem multipolar.²⁴ Dalam sistem bipolar, kedua negara yang mengalami *balance of power* akan berusaha untuk mempertahankan sistem sebagai upaya untuk mempertahankan dirinya.

Perspektif neorealisme yang mengatakan bahwa struktur dan sistem menjadi penentu dari tindakan negara direfleksikan dalam kasus Selandia Baru. Terkait dengan studi kasus Selandia Baru, tindakan yang diambil oleh Selandia Baru disebabkan oleh perubahan dalam struktur dan sistem di wilayah negaranya, Oceania. Perubahan sistem terjadi ketika negara berkekuatan besar, Tiongkok, mulai melakukan pendekatan geopolitik di wilayah Oceania. Sehingga, sesuai dengan perspektif ini, Selandia Baru mengatur strategi kebijakan luar negerinya seiring dengan perubahan sistem yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh Selandia Baru untuk bertahan hidup dan juga untuk memenuhi kepentingan negaranya.

Teori Hedging

Resiko utama yang menjadi bagian dari kalkulasi negara dalam politik internasional adalah resiko dalam bidang keamanan, ekonomi, dan politik. Masing-

²¹ Robert H Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations*, 5th ed. (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

²² Kenneth N. Waltz, op. cit.

²³ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).

²⁴ Ibid.

masing dari resiko ini memiliki sumber yang berbeda-beda namun, terlepas dari sumbernya resiko ini sangat berbahaya bagi negara kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan internal negara yang cenderung mengundang eksploitasi eksternal, dan karena negara-negara kecil ini kekurangan sumber daya untuk menghadapi guncangan struktural, dan untuk memitigasi resikonya sendiri.²⁵ Oleh karena itu, karena situasi yang tidak pasti ini dan resiko yang terlalu besar, negara kecil selalu cenderung untuk *hedging*. Perilaku *hedging* hanya dapat dilakukan jika dipenuhi tiga kondisi. "(a) *the absence of an immediate threat (that might compel a state to ally with a power for protection)*; (b) *the absence of any ideological fault-lines (that might rigidly divide states into opposing camps)*; and (c) *the absence of an all-out Great Power rivalry (that might force smaller states to choose sides)*."²⁶

Dalam teori *hedging* terdapat lima jenis perilaku *hedging* yang dapat dilakukan negara yaitu *economic-pragmatism* (negara berupaya untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi), *binding-engagement* (negara berupaya untuk mempertahankan komunikasi dan meningkatkan kemungkinan untuk mempengaruhi pilihan kebijakan negara besar), *limited-bandwagoning* (negara bersekutu dengan negara yang memiliki prospek untuk mencapai keunggulan), *dominance-denial* (negara menolak dan mencegah munculnya kekuatan yang dominan) dan *indirect-balancing* (negara melakukan upaya militer untuk mengatasi ketidakpastian).

Dalam kasus Selandia Baru, Tiongkok terkenal sebagai negara yang tidak transparan sehingga terdapat banyak spekulasi dan keraguan akan intensi pendekatan Tiongkok di Oceania. Tidak

hanya itu, dalam hal ideologi, Selandia Baru dan Tiongkok memiliki ideologi yang sangat bertolak belakang dan banyak juga tindakan Tiongkok yang tidak sesuai dengan ideologi Selandia Baru. Dari sisi ideologi ini, Selandia Baru seharusnya tidak bersekutu dengan Tiongkok dan mengecam perilakunya. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomi, Tiongkok merupakan rekan dagang yang sangat menguntungkan bagi Selandia Baru yang saat ini mengutamakan kepentingan ekonominya. Jika berusaha untuk berpegang pada ideologi negara maka Selandia Baru akan kehilangan keuntungan ekonominya namun, mengabaikan pelanggaran ideologi dan perbedaan ideologi juga dapat membawa ancaman bagi Selandia Baru di Oceania. Untuk menjelaskan perilaku Selandia Baru dalam merespon pendekatan Tiongkok dapat digunakan teori *hedging* yaitu *economic-pragmatism*. Penulis menggunakan teori ini untuk membantu dalam menganalisa respon Selandia Baru dimana, dalam beberapa isu terlihat mementingkan kepentingan ekonominya dibandingkan kepentingan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan analisa dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian dipaparkan dengan mendeskripsikan fakta yang nyata adanya sespesifik mungkin. Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dari hal yang diteliti. Pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan cara analisa dokumen. Analisa dokumen merupakan sebuah prosedur sistematis dalam mengevaluasi dokumen, baik dalam bentuk cetak atau elektronik.²⁷ Dokumen yang dianalisa berupa buku, jurnal, *press release*, berita dan publikasi pemerintah.

²⁵ Kuik Cheng-Chwee, "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to A Rising China", *Contemporary Southeast Asia* 30, no. 2 (2008): 159-185, doi:10.1355/cs30-2a.

²⁶ Ibid. hlm. 165

²⁷ Glenn A. Bowen, "Document Analysis as A Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27-40, doi:10.3316/qrj0902027.

Analisa terhadap dokumen dilakukan untuk memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pendekatan Tiongkok

Dalam upayanya untuk mendekati diri dengan negara-negara Pasifik Selatan, pemerintah Tiongkok membangun sebuah identitas yang menyatukan Tiongkok dengan negara-negara ini. Identitas Tiongkok dan negara Pasifik Selatan sebagai negara berkembang dimanfaatkan oleh Tiongkok dimana, identitas sebagai negara berkembang yang memiliki latar belakang kolonisasi yang serupa diharapkan dapat membantu dalam membangun hubungan. Dalam beberapa kesempatan pemimpin Tiongkok juga beberapa kali menyebutkan bahwa Tiongkok dan negara Pasifik Selatan merupakan negara berkembang. Seperti pada pertemuan dengan delapan negara Pasifik Selatan, yang saat itu memiliki hubungan diplomatis dengan Tiongkok, di Pelabuhan Moresby tahun 2018. Pada pertemuan ini Xi Jinping menekankan bahwa *“China and Pacific island countries are all developing countries in the Asia Pacific region, they have been good friends ... good partners ... and good brothers”*.²⁹ Selain itu Tiongkok juga berupaya untuk menekankan bahwa Tiongkok dan negara-negara Pasifik Selatan merupakan partner yang setara. Hal ini ditunjukkan ketika para pemimpin negara Pasifik Selatan mengunjungi Tiongkok dan diberikan perlakuan yang mewah dengan karpet

merah. Pada 1984, Sekjen dari CCP Hu Yaobang mengunjungi wilayah ini dan menekankan bahwa Tiongkok menghormati kedaulatan dari negara-negara Pasifik Selatan dan hubungan mereka dengan negara lain.³⁰

Tiongkok juga berupaya untuk meningkatkan keterlibatannya di wilayah Oceania. Pada April 2006 Perdana menteri Wen Jiabao, pergi ke Fiji untuk menghadiri pertemuan pertama antara Tiongkok dan negara-negara Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya ini, Tiongkok mengumumkan pemberian bantuan pada negara-negara Pasifik Selatan Selatan sebagai upaya untuk mempererat hubungan. Beijing memberlakukan *zero-tariff* terhadap barang-barang dari negara-negara ini, membatalkan hutang mereka yang jatuh tempo pada akhir tahun 2005, Tiongkok juga akan melatih 2000 pejabat pemerintah Pasifik Selatan serta memberikan obat anti-malaria gratis selama tiga tahun kedepan.³¹ Saat menghadiri pertemuan para pemimpin forum APEC ke-16 pada November 2006, Presiden Hu Jintao bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini Michael Somare dan menegaskan kebijakan Tiongkok untuk melanjutkan pertukaran tingkat tinggi dengan Papua Nugini dan memperdalam kepercayaan politik serta memperluas kerjasama di bidang-bidang seperti perdagangan, pertanian, budaya, pendidikan dan kesehatan.³²

Untuk mendekat ke wilayah Oceania Tiongkok juga memberikan berbagai macam bantuan finansial pada negara-negara Pasifik Selatan. Peran

²⁸ Juliet Corbin dan Anselm Strauss, "Basics of Qualitative Research (3Rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory", 2008, doi:10.4135/9781452230153.

²⁹ "China, Pacific Island Countries Lift Ties to Comprehensive Strategic Partnership," *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*, 16 November, 2018, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/2018zt/xjpcxytjhzz/201811/t20181122_709979.html. Diakses 08 November 2022.

³⁰ Op.Cit. hal. 171

³¹ "Aid Package Announced for South Pacific States," *China Daily*, 6 April, 2006, https://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/06/content_561163.htm. Diakses 14 November 2022.

³² "Chinese President Meets Papua New Guinea PM, Calling for Deepening Cooperation," *Xinhua*, 22 Juni, 2018, http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/22/c_137271814.htm. Diakses 14 November 2022

Tiongkok sebagai donor di wilayah ini semakin berkembang beberapa dekade ini. Jumlah donor Tiongkok tidak beda jauh dengan donor dari negara lain seperti Jepang dan Selandia Baru. Tiongkok memberi bantuan dana sejumlah 2 juta dolar untuk pembangunan fasilitas olahraga multiguna di Fiji dan 5,5 juta dolar untuk kompleks olahraga nasional di Kiribati.³³ Tiongkok juga mendanai pembangunan kembali *Highlands Highway* Papua Nugini serta membangun sekolah hukum di Universitas Pasifik Selatan Selatan. Tiongkok juga membantu dalam beberapa proyek seperti yang diumumkan oleh Mao Ning, juru bicara Kemenlu Tiongkok, dalam konferensi pers pada 5 September 2022 bahwa proyek Rumah Sakit Provinsi Enga di Papua Nugini dan Taman Persahabatan Tiongkok-Samoa di Samoa telah selesai, renovasi Taman Tobwaan te Rikirake di Kiribati, proyek gedung asrama Universitas Nasional Kepulauan Solomon dan proyek jalan Penakosta di Vanuatu sudah mulai dikerjakan.³⁴ Selain dari konferensi pers ini, Dr. Philippa Brant dari *Lowy Institute* juga menyatakan bahwa:

“China has been expanding its foreign aid program. In the last decade, nations from Samoa to Vanuatu have received hundreds of millions in funding. Chinese aid helps these countries build much-needed infrastructure, from the National Medical Centre in Samoa, to water pipes in the Cook Islands, to university dormitories in Goroka, Papua New Guinea. China stepped up its engagement in 2006 when it held the first

*China–Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation Forum, pledging increased funding to the eight countries with which it has diplomatic relations.”*³⁵

Selain bantuan dalam bentuk finansial, Tiongkok juga memberikan bantuan militer dalam bentuk pelatihan dimana, universitas di Tiongkok memberikan program beasiswa dan pelatihan jangka pendek untuk melatih perwira militer. Salah satunya, pada September 2018, Estia Batiniqila menjadi perwira perempuan pertama dari Angkatan Laut Fiji yang mendapatkan beasiswa empat tahun di *Dalian University*, Tiongkok.³⁶

Dalam bidang pariwisata, Tiongkok telah memberikan *Approved Destination Status for Chinese* untuk beberapa negara Pasifik Selatan yaitu: Tonga (2003), Fiji (2004), Cook Islands (2004), Vanuatu (2005), Negara Federasi Mikronesia (2006), Papua Nugini (2006), Samoa (2006), Solomon Islands (2019) dan Kiribati (2020).³⁷ Dengan memberikan izin, agen travel Tiongkok diperbolehkan untuk membuat paket tur di negara-negara ini dan memperbolehkan iklan untuk produk pariwisata negara-negara ini. Diberikannya izin ini telah membawa banyak keuntungan bagi negara-negara Pasifik Selatan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa telah terlihat jelas upaya Tiongkok untuk mendekatkan diri dan untuk memperluas pengaruhnya di Oceania. Namun, tentu saja bantuan dan pendekatan yang oleh Tiongkok ini tidak semata-mata untuk

³³ Tamara Renee Shie, “Rising Chinese Influence in the South Pacific: Beijing’s ‘Island Fever,’” *Asian Survey* 47, no. 2 (2007): hal. 307-326, doi:10.1525/as.2007.47.2.307.

³⁴ “Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on 5 September, 2022,” *Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China*, Oktober 5, 2022, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202209/t20220905_10762340.html. Diakses 14 November 2022.

³⁵ Philippa Brant, “The Geopolitics of Chinese Aid,” *Lowy Institute*, 6 Maret, 2015,

<https://www.lowyinstitute.org/publications/geopolitics-chinese-aid>. Diakses 8 November 2022

³⁶ Ashna Kumar, “First Navy Woman Gets Chinese Scholarship in the Officer Ranks,” *PressReader*, 11 September, 2018, <https://www.pressreader.com/fiji/fiji-sun/20180911/282020443188258>.

³⁷ Denghua Zhang, “China in the Pacific and Traditional Powers’ New Pacific Policies: Concerns, Responses and Trends,” *Security Challenges* 16, no. 1 (2020): hal. 78-93.

membantu perkembangan negara-negara Pasifik Selatan. Tiongkok memiliki kepentingan yang ingin dipenuhinya melalui pendekatannya di Oceania.

Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Selandia Baru

Sebelum Perang Dingin, kebijakan luar negeri Selandia Baru masih sangat dipengaruhi oleh Britania Raya. Namun seiring berjalannya waktu, Selandia Baru mulai mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih independen. Kebijakan luar negeri independen ini secara resmi dipromosikan pada masa pemerintahan Kirk-Rowling dimana, disebutkan bahwa dengan bertindak sebagai negara kecil yang independen dan berprinsip, Selandia Baru dapat memainkan peran yang konstruktif dalam dunia internasional.³⁸ Kebijakan luar negeri yang independen berarti, Selandia Baru tidak tunduk pada negara-negara yang lebih kuat, membuat keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari setiap kebijakan, dan mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan dan nilai Selandia Baru.³⁹

Dalam dunia internasional, Selandia Baru mencitrakan negaranya sebagai negara liberal yang menjunjung kebijakan luar negeri moral. Sifat independen dari kebijakan luar negeri Selandia Baru ini telah terlihat dari berbagai aksi Selandia Baru. Hal ini dapat dilihat saat Selandia Baru mengumumkan negaranya bebas nuklir pada tahun 1984. Keputusan ini memunculkan perpecahan antara AS dan

Selandia Baru, serta mengakhiri aliansi diantara keduanya. Tindakan ini juga memunculkan citra negara bersih dan hijau bagi Selandia Baru di mata dunia. Kebijakan luar negeri yang independen oleh Selandia Baru juga dapat dilihat saat Perdana Menteri Helen Clark menolak untuk mengirimkan pasukan Selandia Baru untuk bergabung dalam invasi Irak oleh AS.⁴⁰ Dalam bidang pertahanan, kebijakan luar negeri Selandia Baru banyak dipengaruhi oleh nilai liberalisme. Dalam hal ini, signifikansi dari aliansi berkurang dan walaupun berada dibawah tekanan internasional, Selandia Baru tetap mempertahankan kebijakan anti nuklirnya hingga sekarang.⁴¹ Dalam bidang perdagangan, Selandia Baru telah berubah dari negara proteksionis, menjadi pendukung dari liberalisasi perdagangan internasional. Hal ini dilakukan oleh Selandia Baru dengan membuat *Free Trade Agreement* (FTA) dengan berbagai negara. Selain itu, Selandia Baru juga merupakan pendukung dari kerjasama multilateral dan institusi internasional. Selandia Baru memastikan bahwa komitmen HAM dimasukkan dalam Piagam PBB dan membantu dalam mendirikan *Trusteeship* serta *Economic and Social Councils*.⁴²

Menurut Hager, sifat independen dari kebijakan luar negeri Selandia Baru ini dipertahankan di era pemerintahan siapa pun, baik pada pemerintahan politik kiri maupun kanan.⁴³ Perdana Menteri yang menjabat secara reguler memberikan pidato kebijakan luar negeri yang menekankan komitmen mereka terhadap kebijakan luar

³⁸ Nicky Hager, "Principled Small Nation or Stalwart Ally? New Zealand's Independent Foreign Policy," *The World of Small States*, 2019, pp. 363-377, doi:10.1007/978-3-030-18803-0_21.

³⁹ Reuben Steff dan Francesca Dodd-Parr, "Examining the Immanent Dilemma of Small States in the Asia-Pacific: The Strategic Triangle between New Zealand, the US and China," *The Pacific Review* 32, no. 1 (2018): hal. 90-112, doi:10.1080/09512748.2017.1417324.

⁴⁰ Helen Clark, "Full Text: Helen Clark's Statement to Parliament on Iraq," *New Zealand Herald*, 18 September, 2020,

https://www.nzherald.co.nz/nz/full-text-helen-clarks-statement-to-parliament-on-iraq/LHTS6WR4NKDGRF6PMNU66GNG7U/?c_id=1&objectid=3250841.

⁴¹ Andreas Reitzig, "The Contours of New Zealand Foreign Policy," *New Zealand and the World*, 2018, hal.: 393-409, doi:10.1142/9789813232402_0024.

⁴² Jackson R, "Multilateralism: New Zealand and the United Nations," in *Sovereignty under Siege?: Globalization and New Zealand* (Routledge, 2005), hal. 193-212.

⁴³ Hager, op. cit, 363.

negeri yang independen.⁴⁴ Namun kenyataannya, kebijakan luar negeri Selandia Baru tidak selalu konsisten dengan citra yang sudah dibangunnya ini. Dalam beberapa kesempatan citra liberal dan prinsip moral Selandia Baru ini tidak terlihat. Salah satunya adalah pada upaya Selandia Baru dalam ekonominya. Selandia Baru yang menekankan pendekatan moral pada kebijakan luar negerinya dan mengadvokasikan keberlangsungan lingkungan, membuat FTA dengan beberapa negara yang tidak sejalan dengan nilai kebijakan luar negerinya ini. Selandia Baru membuat FTA dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, Belarus dan Kazakhstan. Tiongkok sendiri telah banyak dikritik atas pelanggaran HAM serta pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan. Kemudian, India merupakan negara yang telah melanggar traktat non-proliferasi nuklir. Selain itu, Belarusia dan Kazakhstan merupakan dua negara yang telah dikritik oleh *Human Rights Watch* atas pelanggaran dan penindasan HAM yang mereka lakukan.

Independensi dari kebijakan luar negeri Selandia Baru juga tidak terlihat dalam beberapa tindakan militernya. Walaupun Selandia Baru pernah menolak untuk mengirimkan pasukan saat invasi Irak, kebanyakan pengerahan pasukan Selandia Baru dilakukan atas dasar pengaruh AS. Dari laporan yang ditulis oleh Martyn Dunne komandan dari *New Zealand Joint Forces* saat kunjungannya ke Afghanistan, dapat dilihat bahwa tidak terdapat tujuan yang jelas dari pengiriman pasukan dan keberadaan pasukan Selandia Baru di Afghanistan hanya untuk menunjukkan komitmen terhadap pasukan sekutu.⁴⁵

Karakteristik kebijakan luar negeri Selandia Baru yang tidak dapat sepenuhnya

independen dan konsisten pada citranya dipengaruhi oleh bentuk negaranya yang merupakan negara kecil. Jika kebijakan luar negeri Selandia Baru dilihat dari sudut pandang negara kecil, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Selandia Baru memiliki karakteristik negara kecil. Menurut Henderson, terdapat enam karakteristik dari kebijakan luar negeri negara kecil yaitu: 1. rendahnya partisipasi dalam isu internasional karena sumber daya yang terbatas; 2. ruang lingkup yang sempit; 3. berfokus pada ekonomi; 4. Menganut paham internasionalisme; 5. penekanan pada moral; 6. menghindari resiko.⁴⁶ Berdasarkan enam karakteristik ini Selandia Baru memiliki 4 karakteristik negara kecil dalam kebijakan luar negerinya.

Pertama, Selandia Baru berfokus pada ekonominya. Perdagangan merupakan salah satu fokus utama dari kebijakan luar negeri Selandia Baru dan sebagai negara yang *capital-poor*, Selandia Baru masih bergantung pada investasi internasional. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya Selandia Baru dalam membentuk FTA serta dalam organisasi seperti WTO dan APEC.

Kedua, Selandia Baru juga menganut paham internasionalisme dimana, Selandia Baru mendukung hukum internasional dan penyelesaian konflik melalui arbitrase internasional. Seperti negara kecil lainnya, Selandia Baru juga bergantung pada organisasi multilateral seperti PBB untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Selandia Baru juga seringkali mengkarakterisasikan dirinya sebagai broker dan fasilitator atau sebagai penengah netral yang dapat menengahi konflik negara lain.⁴⁷

Ketiga, dalam menjalankan kebijakan luar negerinya Selandia Baru menekankan nilai moral negaranya. Salah satunya adalah aksi Selandia Baru dalam

⁴⁴ Hager, op. cit, 363.

⁴⁵ Hager, Op. Cit, 367

⁴⁶ John T. Henderson, Keith Jackson, dan Richard Kennaway, *Beyond New Zealand: The Foreign Policy of a Small State* (Auckland: Methuen, 1980).

⁴⁷ Anne-Marie Brady, "Small Can Be Huge: New Zealand Foreign Policy in an Era of Global Uncertainty," *The World of Small States* 6 (2019): hal. 1-10, doi:10.1007/978-3-030-18803-0_1.

mendeklarasikan negaranya sebagai area bebas nuklir. Namun, dihadapan konflik *great power* dapat dilihat bahwa Selandia Baru menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih untuk bergerak di belakang layar. Contohnya saat Selandia Baru menolak untuk mengkritik Tiongkok secara terbuka setelah dua warga negara Kanada ditahan secara sewenang-wenang oleh Tiongkok.⁴⁸

Keempat, Selandia Baru juga berupaya untuk menghindari resiko dalam kebijakan luar negerinya. Menurut Brady, “*New Zealand has a tradition of raising concerns with allies and strategic partners behind closed doors – avoiding public disagreement*”.⁴⁹ Hal ini dilakukan dengan mempertahankan hubungan positif dengan para pemain utama dan menghindari konfrontasi terbuka. Dari penjelasan ini kebijakan luar negeri Selandia Baru dapat dikategorikan sebagai negara kecil. Dari penjelasan ini juga terlihat jelas bahwa karena karakteristiknya sebagai negara kecil, Selandia Baru tidak dapat sepenuhnya independen dalam menjalankan kebijakan luar negerinya terutama karena karakter Selandia Baru yang menghindari resiko.

Secara resmi, pemerintah Selandia Baru mengadvokasikan dan mempromosikan kebijakan yang independen, liberal, dan hijau. Sifat ini dapat dilihat dalam berbagai tindakan Selandia Baru, namun sifat ini tidak secara konsisten ditunjukkan oleh Selandia Baru. Dalam beberapa kesempatan, Selandia Baru menunjukkan aksi yang bertentangan dengan nilai kebijakan luar negerinya terutama dalam bidang ekonomi dan

militernya serta dalam hal yang melibatkan negara besar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Selandia Baru tidak selalu berpegang pada nilai idealnya dan akan memprioritaskan kepentingan nasionalnya walaupun harus mengabaikan nilainya ini.

Masalah Politik antara Selandia Baru dan Tiongkok

Tiongkok mulai memasuki Oceania di tahun 1975 dimana, Tiongkok menandatangani perjanjian diplomatik dengan Fiji dan Samoa.⁵⁰ Keberadaan Tiongkok semakin terlihat di Oceania terutama setelah Perang Dingin, saat negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai mundur dari wilayah ini. Pada awal pendekatan Tiongkok, Selandia Baru serta sekutunya menyambut kedatangan Tiongkok di wilayah ini karena masuknya Tiongkok ke wilayah ini akan meningkatkan perekonomian dan perdagangan. Selandia Baru bahkan menjadi negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pertama yang menandatangani FTA dengan Tiongkok. Namun di sisi lain, Selandia Baru menunjukkan sikap yang berbeda terkait isu keamanan dan strategis. Pada April 2018, media melaporkan bahwa Tiongkok memiliki ambisi militer di Pasifik dimana, Tiongkok menghubungi Vanuatu terkait pengembangan militer.⁵¹ Sebagai respon, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinta Ardern, menyebutkan bahwa dia tidak dapat berkomentar terkait laporan ini, namun Selandia Baru “menolak militerisasi Pasifik”.⁵² Dalam *Strategic Defence Policy Statement 2018*, disebutkan bahwa

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Iati Iati, “China’s Impact on New Zealand Foreign Policy in the Pacific.” *The China Alternative*, Januari 2021, hal. 143-166, doi:10.2307/j.ctv1h45mkn.8.

⁵¹ David Wroe, “China Eyes Vanuatu Military Base in Plan with Global Ramifications,” *The Sydney*

Morning Herald, 9 April, 2018,

<https://www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html>. Diakses 20 Januari 2023.

⁵² Laura Walters, “PM Opposes Pacific Militarisation as China Eyes Vanuatu Military Base,” *Stuff*, 10 April, 2018, <https://www.stuff.co.nz/national/politics/102971730/pm-opposes-pacific-militarisation-as-china-eyes-vanuatu-military-base>. Diakses 20 Januari 2023.

“China’s increasing contributions to the international order have been visible across a variety of areas...” dan bahwa “New Zealand and others have encouraged China’s increasing engagement on international issues”.⁵³ Namun di sisi lain, disebutkan juga bahwa Tiongkok “...has not consistently adopted the governance and values championed by the order’s traditional leaders” dan bahwa “China holds views on human rights and freedom of information that stand in contrast to those that prevail in New Zealand”.⁵⁴ Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa, Selandia Baru khawatir akan cara pendekatan Tiongkok yang tidak sejalan dengan nilai dan ideologi Selandia Baru.

Dari sudut pandang Selandia Baru, pendekatan Tiongkok ini dapat mengancam kepentingan Selandia Baru di Oceania. Pertama, bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tiongkok memberikan alternatif baru bagi negara-negara di Oceania. Berbeda dengan Selandia Baru, Tiongkok memberikan bantuannya tanpa syarat, bahkan Tiongkok juga memberikan bantuan finansial untuk proyek-proyek spesifik sesuai dengan yang diminta oleh negara-negara penerima. Dengan adanya alternatif, kesempatan Selandia Baru untuk menggunakan bantuannya sebagai alat politik menjadi berkurang di wilayah ini.

Kedua, Tiongkok memiliki nilai dan ideologi yang berbeda dengan Selandia Baru terutama dalam bidang *good governance* dan HAM. Kebijakan Tiongkok serta strateginya saat mendekati diri dengan Oceania seringkali tidak sejalan dengan Selandia Baru. Selandia Baru sendiri dalam kebijakannya terhadap Oceania selalu menjunjung nilai HAM dan *good*

governance. Menurut dokumen *Strategic Defence Policy Statement 2018* disebutkan bahwa Tiongkok telah “... set an alternative model of development – a liberalising economy absent liberal democracy – ...”.⁵⁵ Sehingga, pendekatan Tiongkok mengancam kepentingan Selandia Baru untuk mempertahankan dan mempromosikan ideologi dan norma yang dipegangnya ini.

Selain itu, terdapat juga kekhawatiran terkait keamanan yaitu kemungkinan Tiongkok membangun kekuatan militernya di wilayah Oceania. Saat ini, perkembangan ekonomi dari Tiongkok selalu dibarengi dengan peningkatan kemampuan militernya. Sehingga, dikhawatirkan bahwa Tiongkok akan menggunakan bantuan serta pinjaman yang diberikannya pada negara-negara Pasifik sebagai alat untuk memperluas militernya. Narasi ini disebut sebagai *debt-trap* dimana, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, menuduh Tiongkok menggunakan *debt-trap* pada negara-negara berkembang pada pertemuan APEC di PNG tahun 2018.⁵⁶ Selandia Baru khawatir bahwa negara-negara Pasifik akan jatuh dalam jebakan hutang ini. Wakil Perdana Menteri Peters sendiri telah memperingati negara-negara Pasifik terkait *debt-trap* ini.⁵⁷ Kekhawatiran Selandia Baru ini bukan tanpa alasan. Di Vanuatu dan Tonga, lebih dari setengah dari hutang luar negerinya berasal dari Tiongkok.⁵⁸

Secara keseluruhan, masalah politik yang disebabkan oleh pendekatan Tiongkok di Oceania berupa gangguan terhadap kepentingan Selandia Baru, perbedaan ideologi serta resiko keamanan. Sehingga, Selandia Baru merespon masalah politik ini dengan caranya sendiri sesuai

⁵³ *Strategic Defence Policy Statement 2018*. (Wellington, New Zealand, 2018), hal. 17.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*.

⁵⁶ Lati, Op. Cit, 157

⁵⁷ Michael Walsh, “Pacific Leaders More Questioning of Chinese Influence,” *Radio New Zealand*, 24 November, 2018,

<https://www.rnz.co.nz/news/world/376732/pacific-leaders-more-questioning-of-chinese-influence>. Diakses 20 Januari 2023.

⁵⁸ Klan, “Pacific Nations Drowning in Chinese Debt,” *The Australian*, 2018, <https://www.theaustralian.com.au/>. Diakses 20 Januari 2023.

dengan kapabilitas dan prioritas dari negaranya.

Strategi *Economic Pragmatism* Selandia Baru terhadap Masalah Politik dari Pendekatan Tiongkok di Oceania Tahun 2014-2019

Dalam merespon masalah politik yang disebabkan oleh pendekatan Tiongkok di Oceania, Selandia Baru menggunakan strategi *economic pragmatism* dimana, Selandia Baru tetap memaksimalkan kepentingan ekonominya terhadap Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan antara Selandia Baru dan Tiongkok walaupun terdapat masalah politik ini. Peningkatan aktivitas ekonomi ini dapat dilihat dari beberapa kejadian penting dalam hubungan perekonomian antara kedua negara ini.

Perubahan kebijakan luar negeri ini datang dari koalisi minoritas kiri-tengah yang menggantikan pemerintahan konservatif tiga periode. Koalisi ini terdiri dari *Labour* dan *New Zealand First* yang didukung oleh Partai *Greens*. Bagian urusan kebijakan luar negeri sendiri berada di tangan Partai *NZ First* yang cukup populis. Perubahan ini terjadi setelah dikeluarkannya pernyataan bersama dari kedua negara. Setelah dikeluarkannya pernyataan ini, Selandia Baru mulai cenderung untuk mengutamakan kepentingan ekonominya. Salah satunya terlihat dari aksi Menteri Luar Negeri Winston Peters yang mengumumkan *Pacific Reset* ketika Tiongkok secara signifikan meningkatkan aktivitasnya di Oceania. Ardern, sebagai pemimpin dari era pemerintahan periode ini, dalam beberapa kesempatan juga telah menunjukkan sikap yang sejalan dengan

strategi ini. Pada kunjungannya di tahun 2019, Ardern menekankan bahwa Tiongkok adalah mitra yang berharga dan berjanji bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Selandia Baru.⁵⁹ Dalam kunjungannya ini Ardern juga mengutamakan kepentingan ekonomi Selandia Baru dan tidak pernah mengucapkan kata-kata negatif tentang perilaku buruk Beijing.

1. Pernyataan Bersama tentang Pembentukan *Comprehensive Strategic Partnership* pada Tahun 2014

Pada 19 hingga 21 November 2014, Presiden Xi Jinping berkunjung ke Selandia Baru atas undangan dari Perdana Menteri John Key.⁶⁰ Dalam pertemuan ini, kedua pihak berdiskusi terkait perkembangan hubungan bilateral kedua negara serta perluasan kerja sama praktis dan perdagangan. Sehingga, dari pertemuan ini dihasilkan pernyataan bersama yang berisi lima belas poin kerangka kerja dari hubungan bilateral antara kedua negara. Secara singkat, poin pertama menyatakan niat kedua pihak untuk meningkatkan interaksi level tinggi antara kedua negara. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kontak antara badan pemerintahan, badan legislatif, dan konsultasi diplomatik bilateral. Poin kedua menyatakan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara ini didasari atas kesetaraan dan saling menghormati. Poin ketiga menyatakan niat kedua negara untuk mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat melalui FTA yang relevan. Poin keempat membahas perluasan kerja sama dalam bidang

⁵⁹ Patrick Köllner, "Australia and New Zealand Recalibrate Their China Policies," *Merics*, 8 Agustus, 2019, <https://merics.org/en/analysis/australia-and-new-zealand-recalibrate-their-china-policies>. Diakses 27 Maret 2023.

⁶⁰ John Key, *Joint Statement between New Zealand and the People's Republic of China on the*

Establishment of a Comprehensive Strategic Partnership, Joint Statement between New Zealand and the People's Republic of China on the Establishment of a Comprehensive Strategic Partnership, 2014.

agrikultur dan peternakan melalui *Food Supervisory and Traceability Cooperation Programme* dan investasi. Terkait investasi dinyatakan bahwa “Both sides reaffirm that they welcome the investment of the other side’s companies”.⁶¹

Poin kelima menyatakan pengakuan kedua negara akan kepentingan bersama di bidang perubahan iklim serta penandatanganan kerjasama di bidang ini oleh Presiden Xi Jinping. Poin keenam menyampaikan dukungan kedua negara untuk memperdalam kerja sama bidang pariwisata, budaya, olah raga, penyiaran, televisi, dan Antartika salah satunya melalui program *sister city*. Poin ketujuh menyatakan kerja sama bidang ekonomi melalui program pertukaran serta meningkatkan pembelajaran bahasa mandarin di Selandia Baru. Poin kedelapan membahas penguatan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin kesembilan menyatakan bahwa, kedua negara akan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pertahanan jangka panjang melalui kunjungan bilateral tingkat tinggi dan kerja sama dalam pelatihan. Poin kesepuluh membahas kerja sama terkait anti pembajakan, *counter-terrorism* dan pencegahan bencana serta mitigasi. Poin kesebelas menyatakan kerja sama di bidangn kejahatan dan hukum melalui kerja sama formal *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* serta kerja sama *Police to Police*. Pada poin kedua belas, kedua pihak menyatakan komitmen pada pemajuan dan perlindungan HAM. Poin ketiga belas menyatakan niat kedua negara untuk mempertahankan komunikasi dan koordinasi terkait isu internasional dan regional terutama dalam APEC, *the East Asia Summit*, ASEAN *Regional Forum*, ADMM+. WTO, dan *Asia-Europe Meeting*. Pada poin keempat

belas, kedua negara memperkuat komitmen mereka untuk bekerja secara konstruktif di wilayah Pasifik. Poin kelima belas menyatakan kesuksesan dari kunjungan Presiden Xi Jinping.

Bagi Selandia Baru, dikeluarkannya pernyataan bersama ini berarti Selandia Baru ingin mempererat hubungannya dengan Tiongkok. Masing-masing poin dari pernyataan bersama ini secara langsung ataupun tidak langsung, berhubungan dengan kepentingan ekonomi Selandia Baru. Kerja sama ini juga dijalankan diberbagai bidang yang secara keseluruhan mendukung perekonomian dan perdagangan Selandia Baru. Sehingga, dapat dilihat niat Selandia Baru terhadap Tiongkok yaitu pemenuhan kepentingan ekonominya.

2. *Belt and Road Initiative (BRI)*

Selandia Baru menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* untuk kerja sama dalam BRI pada 27 Maret 2017.⁶² Dengan menandatangani MoA ini, Selandia Baru dan Tiongkok sepakat untuk menyusun rencana aksi bilateral selama delapan belas bulan kedepan. Dalam dokumen MoA disebutkan bahwa terdapat empat area kerja sama. Pertama, kerja sama dalam bidang kebijakan yang dilakukan melalui dialog terkait strategi, rencana dan kebijakan perkembangan dari kedua negara. Kedua, kerja sama bilateral melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan. Untuk bagian kedua ini, Selandia Baru dan Tiongkok menyatakan rencananya untuk memperbaharui FTA kedua negara dan memperluas arus investasi dua arah. Ketiga, pertukaran budaya dalam bidang pendidikan, pariwisata, pemerintah lokal dan pemuda. Keempat, kerja sama multilateral melalui peningkatan mekanisme internasional dan regional.

Dengan menandatangani MoA ini Selandia Baru telah menyatakan

⁶¹ Ibid.

⁶² New Zealand China Council, *Belt and Road Initiative: A Strategic Pathway*, *Belt and Road Initiative: A Strategic Pathway*, 2018.

ketertarikannya terhadap BRI. Dari sisi Tiongkok, MoA ini dianggap sebagai fasilitator untuk memperdalam diskusi terkait proyek kerja sama ekonomi seperti pembaharuan FTA.⁶³ Selandia Baru juga di sebut sebagai pelopor dimana, Selandia Baru merupakan negara Barat pertama yang bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan juga negara Barat pertama yang menandatangani perjanjian kerja sama BRI.⁶⁴

Nyatanya, kebanyakan dari area kerja sama yang disebutkan dalam MoA ini merupakan kerja sama yang sudah berjalan sejak lama. Jika dibandingkan dengan isi dari pernyataan bersama tahun 2014, maka dapat dilihat banyaknya kemiripan dari area kerja sama yang disebutkan. Namun, dapat dikatakan bahwa dengan ditanda tangannya MoA ini, Selandia Baru telah membuka jalan untuk pengembangan kerja sama. Hal ini dapat dilihat dari niat kedua negara untuk memperbaharui FTA yang disebutkan dalam MoA ini. Sehingga, terlihat bahwa Selandia Baru memiliki niat untuk tetap berhubungan ekonomi dengan Tiongkok di masa depan. Jika dibandingkan dengan Australia, negara dengan masalah politik terhadap Tiongkok yang serupa dengan Selandia Baru, tindakan Selandia Baru ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan negara yang berideologi serupa. Walaupun pada akhirnya Australia menandatangani MoU terkait BRI ini, awalnya Australia menolak tawaran BRI

Tiongkok dengan tegas. Tindakan Selandia Baru yang menyambut dengan baik tawaran Tiongkok ini, walaupun terdapat masalah politik di Pasifik, menunjukkan kecenderungan Selandia Baru terhadap kepentingan ekonominya.

3. Pembaharuan FTA Antara Tiongkok dan Selandia Baru pada Tahun 2019

Pada April 2008, Selandia Baru menjadi negara maju pertama yang menyelesaikan negosiasi FTA dengan Tiongkok dan juga menjadi negara pertama yang melaksanakan negosiasi untuk pembaharuan FTA dengan Tiongkok pada tahun 2016.⁶⁵ Negosiasi pembaharuan FTA ini selesai dinegosiasikan pada November 2019, saat Perdana Menteri Li Keqiang bertemu dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Bangkok.⁶⁶ Pembaharuan ini menambahkan beberapa aturan baru yang akan mempermudah ekspor ke Tiongkok serta fleksibilitas dalam alokasi visa bagi pekerja Tiongkok. Menurut Ardern negosiasi pembaharuan ini akan “... *ensures our upgraded free trade agreement will remain the best that China has with any country*”.⁶⁷ Pembaharuan ini juga berarti bahwa pada 2024, Selandia Baru akan memiliki akses terbaik ke Tiongkok untuk produk susu.⁶⁸

Sejak ditandatanganinya FTA di tahun 2008, Tiongkok telah tumbuh mejadi mitra dagang barang terbesar Selandia Baru dan kedua terbesar untuk

⁶³ Jason Young dan Jake Lin, *The Belt and Road Initiative: A New Zealand Appraisal* (Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington, New Zealand Contemporary China Research Centre, 2018).

⁶⁴ Erwen Xu, “Remarks by Consul General Xu Erwen At Chinese New Year Dinner,” *Consulate-General of the People Republic of China in Auckland*, 2018, http://auckland.china-consulate.gov.cn/eng/zlgxw/201801/t20180130_154878.htm. Diakses 20 Januari 2023.

⁶⁵ MFAT, “China,” *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade*, 2023, <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/asia/china/>. Diakses 18 Januari 2023.

⁶⁶ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, “Li Keqiang Meets with Prime Minister Jacinda Ardern of New Zealand,” 2019, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2797_665439/3412_664880/3414_664884/201911/t20191106_587128.html.

⁶⁷ Audrey Young, “Jacinda Ardern Secures Upgrade on China Free Trade Deal,” *NZ Herald*, 22 September, 2020, https://www.nzherald.co.nz/nz/jacinda-ardern-announces-upgrade-on-free-trade-agreement-with-china/BDWU3W46EM77W66UUCG5OQ43RM/?c_id=3&objectid=12281876. Diakses 18 Januari 2023.

⁶⁸ Ibid.

jasa. FTA yang awalnya diproyeksikan untuk meningkatkan ekspor antara \$225-\$350 juta setiap tahun, melampaui espektasi ini dan meningkatkan ekspor sebesar \$1 miliar di tahun pertama dan bertambah terus setiap tahunnya.⁶⁹ Dapat dikatakan bahwa pembaharuan FTA antara Selandia Baru dan Tiongkok dilakukan karena kesuksesan dari FTA tahun 2008 ini. Pembaharuan FTA ini menunjukkan bahwa Selandia Baru berniat untuk mempermudah dan semakin meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Dilakukannya pembaharuan ini ditengah masalah politik di wilayah Pasifik, memperjelas tindakan *economic pragmatism* Selandia Baru.

Analisa Respon Selandia Baru terhadap Tiongkok

Dalam jangka waktu 2014-2019 dapat dilihat bahwa respon Selandia Baru terhadap pendekatan Tiongkok di Oceania berupa *hedging* dalam spektrum *economic pragmatism*. Walaupun Selandia Baru memiliki masalah politik dengan Tiongkok, Selandia Baru tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat melalui beberapa bentuk kerja sama perdagangan dan perkembangan. Pilihan Selandia Baru untuk menggunakan strategi ini dapat dijelaskan dengan menganalisa karakteristik Selandia Baru sebagai negara kecil. Dalam hal ini, Selandia Baru sebagai negara kecil berupaya untuk mengimbangi resiko terutama dalam situasi tanpa kepastian dan dengan tingkat taruhan yang tinggi. Untuk kasus ini, pendekatan Tiongkok di Oceania belum menunjukkan dampak yang pasti sehingga, Selandia Baru sendiri tidak dapat mengambil resiko yang terlalu besar dan memilih untuk menggunakan strategi *economic pragmatism*.

Sebagai sebuah negara kecil, Selandia Baru belum mampu untuk sepenuhnya menentang tindakan negara

great power. Terhadap Tiongkok yang merupakan raksasa ekonomi di politik internasional, Selandia Baru masih memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2018, tingkat ekspor Selandia Baru dengan Tiongkok sudah mencapai 24,25%.⁷⁰ Keuntungan ekonomi Selandia Baru dari hubungan ekonominya dengan Tiongkok juga sangat tinggi. Sehingga, akan sulit bagi Selandia Baru untuk mencari pengganti Tiongkok jika hubungan antara kedua negara memburuk. Hal inilah yang kemudian membentuk perilaku Selandia Baru terhadap Tiongkok. Dalam kasus dan konflik kontroversial Tiongkok, Selandia Baru tidak pernah secara eksplisit menentang Tiongkok walaupun tindakan Tiongkok jelas-jelas menentang ideologi Selandia Baru. Salah satunya dalam konflik Laut Cina Selatan. Selandia Baru yang dalam kebijakan luar negerinya memegang teguh institusi internasional serta UNCLOS, hanya memberikan komentar yang general dan tidak menunjukkan pertentangan terhadap tindakan Tiongkok.

Respon Selandia Baru terhadap Tiongkok dalam konflik LCS juga terefleksikan dalam responnya terhadap pendekatan Tiongkok di Oceania. Dalam merespon, Selandia Baru tidak pernah secara eksplisit menunjukkan kekhawatirannya terhadap pendekatan Tiongkok. Seperti dalam kebijakan *Pacific Reset* yang dikeluarkan setelah Tiongkok terlihat meningkatkan keterlibatannya di Oceania. *Pacific Reset* secara implisit menyebutkan bahwa wilayah Oceania yang semakin diperebutkan oleh *great power* memunculkan kekhawatiran bagi Selandia Baru. Jika dianalisa lebih dalam, kalimat ini ditujukan pada Tiongkok yang pada saat kebijakan ini dikeluarkan, merupakan pemain baru di wilayah Oceania. Perilaku hati-hati ini juga merupakan bagian dari strategi *economic pragmatism* Selandia Baru. Agar dapat melanjutkan hubungan

⁶⁹ MFAT, Op.Cit.

⁷⁰ Anne-Marie Brady, "Small Can Be Huge: New Zealand Foreign Policy in an Era of Global

Uncertainty," *The World of Small States*, 2019, hal. 1-10, doi:10.1007/978-3-030-18803-0_1.

ekonomi dengan Tiongkok, Selandia Baru tidak dapat menunjukkan kekhawatirannya terhadap pendekatan Tiongkok secara eksplisit karena khawatir akan mengimplikasi hubungan ekonominya dengan Tiongkok.

Kebijakan luar negeri Selandia Baru juga memunculkan beberapa respon dari warga negaranya. *Asia New Zealand Foundation* melaksanakan beberapa survei terkait persepsi warga Selandia Baru terhadap hubungan antara Tiongkok dan Selandia Baru. Terkait hubungan ekonomi, 76% warga Selandia Baru setuju bahwa Selandia Baru harus mencari pasar baru untuk mengurangi kebergantungan ekonomi terhadap Tiongkok.⁷¹ Terkait masalah politik dan keamanan, mayoritas dari warga Selandia Baru (53%) mendukung dialog politik tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara.⁷² Kemudian, sebanyak 63% warga Selandia Baru mendukung pengenaan sanksi perjalanan dan keuangan terhadap pejabat Tiongkok yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM.⁷³ Dari beberapa hasil survey ini dapat dikatakan bahwa aksi pemerintah Selandia Baru yang mempererat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok tidak sepenuhnya didukung oleh warga negaranya karena mayoritas dari warga negaranya ingin mengurangi ketergantungan dengan Tiongkok. Warga negara Selandia Baru juga terlihat tidak setuju dengan pelanggaran HAM Tiongkok sehingga, aksi pemerintah Selandia Baru yang tidak mengkecam dan malah fokus pada kepentingan ekonomi tentu juga tidak disenangi oleh warganya. Namun, dapat dilihat bahwa warga negara Selandia Baru juga tidak sepenuhnya ingin memutuskan hubungan dengan Tiongkok, dimaana mayoritas warga Selandia Baru masih setuju dengan diadakannya dialog politik antara kedua negara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa warga negara Selandia

Baru ingin negaranya menjadi lebih independen secara ekonomi sambil tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan strategi *economic-pragmatism* yang diambil oleh Selandia Baru dalam merespon aktifnya Tiongkok di wilayah Oceania. Tiongkok sendiri mulai meningkatkan aktivitasnya di wilayah Oceania setelah Amerika Serikat mulai mengurangi keterlibatannya di Oceania. Hubungan antara Tiongkok dan Oceania kemudian berkembang pesat diikuti dengan meningkatnya jumlah kunjungan resmi dan bantuan finansial oleh Tiongkok. Pendekatan Tiongkok terhadap Oceania semakin terlihat jelas setelah beberapa pejabat tingkat tinggi Tiongkok mengunjungi negara-negara Pasifik. Tiongkok juga mengumumkan berbagai bantuan finansial dan pembangunan, salah satu proyek bantuan Tiongkok adalah dalam pembangunan Taman Matagalalua. Selain dalam bentuk finansial, Tiongkok juga memberikan bantuan militer melalui pelatihan dan pemberian beasiswa bagi perwira militer. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan oleh Tiongkok untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan diplomatisnya. Melalui pendekatannya ini Tiongkok berhasil mendapatkan SDA yang penting bagi perkembangan ekonominya serta dukungan diplomatik dari sebagian besar negara di wilayah ini.

Dari sudut pandang Selandia Baru, pendekatan Tiongkok ini dapat mengancam kepentingan Selandia Baru. Pada dasarnya, Selandia Baru dan Tiongkok memiliki ideologi yang bertolak belakang. Dalam kebijakan luar negerinya Selandia Baru selalu berpegang pada insitusi nasional serta pada ideologi demokrasi. Selain itu, kehadiran Tiongkok juga memberikan

⁷¹ Asia New Zealand Foundation, *Perceptions of Asia 2021*, 2022, <https://www.asianz.org.nz/research/twenty-five-years-of-new-zealanders-views-of-asia/>.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

alternatif lain bagi negara-negara di wilayah ini sehingga menurunkan pengaruh Selandia Baru di Oceania. Selandia Baru juga khawatir bahwa akan muncul ancaman keamanan sebagai dampak dari pendekatan Tiongkok ini dimana, dikhawatirkan bahwa banuan serta pijaman akan digunakan oleh Tiongkok untuk memperluas pengaruh militernya. Dengan munculnya masalah politik dari pendekatan Tiongkok ini maka Selandia Baru tentu saja harus memberikan respon yang paling menguntungkan bagi negaranya.

Terhadap pendekatan Tiongkok ini, Selandia Baru merespon dengan menggunakan strategi *economic pragmatism*. Hal ini berarti, Selandia Baru tetap berupaya untuk memaksimalkan keuntungan ekonominya walaupun terdapat masalah politik antara Selandia Baru dan Tiongkok. Strategi ini paling jelas terlihat di tahun 2014-2019 dimana, dalam jangka waktu ini Selandia Baru membangun dasar-dasar dari kerja sama ekonomi antara kedua negara. Beberapa tindakan yang paling menonjol adalah pernyataan bersama oleh pemerintah Selandia Baru dan Tiongkok, penandatanganan MoA BRI serta pembaharuan FTA. Perjanjian-perjanjian ini menjadi fondasi bagi kerja sama ekonomi antara kedua negara di berbagai bidang. Di tahun-tahun setelahnya perjanjian ini mendorong berkembangnya kerja sama antara kedua negara ke berbagai bidang. Tindakan-tindakan ekonomi ini dilakukan oleh Selandia Baru di tengah-tengah tingginya pendekatan Tiongkok di Oceania yang secara jelas merupakan masalah politik bagi Selandia Baru. Selama jangka waktu ini, Selandia Baru tidak menunjukkan pertentangan terhadap perilaku Tiongkok yang tidak sejalan dengan ideologi Selandia Baru. Seperti dalam kasus LCS dimana, Selandia Baru sebagai pendukung UNCLOS, tidak menunjukkan penolakan eksplisit terhadap perilaku Tiongkok. Sehingga, dapat dikatakan bahwa terhadap Tiongkok, Selandia Baru memilih untuk

memaksimalkan kepentingan ekonominya dibandingkan ideologinya.

Tindakan Selandia Baru ini dapat dianalisa dari karakteristik Selandia Baru sebagai negara kecil. Sebagai negara kecil, akan sulit bagi Selandia Baru untuk menentang Tiongkok yang merupakan raksasa ekonomi di dunia internasional. Terlebih lagi, kepentingan ekonomi Selandia Baru yang terpaut erat dengan Tiongkok. Sehingga, baik buruknya hubungan Selandia Baru dengan Tiongkok juga akan berdampak pada kepentingan ekonomi Selandia Baru. Strategi Selandia Baru untuk menggunakan *economic pragmatism* dilakukan untuk mengurangi resiko sebesar-besarnya. Dengan menggunakan strategi ini, Selandia Baru dapat memenuhi kepentingan ekonominya tanpa mengimplikasi hubungannya dengan negara manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- “Aid Package Announced for South Pacific States.” *China Daily*, 6 April, 2006. https://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/06/content_561163.htm.
- “China Increases Aid Spending in South Pacific.” *South China Morning Post*, 9 Agustus, 2018. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2158894/china-ups-aid-spending-south-pacific-it-seeks-grow>.
- “Chinese President Meets Papua New Guinea PM, Calling for Deepening Cooperation.” *Xinhua*, 22 Juni, 2018. http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/22/c_137271814.htm.
- “Taiwanese Officials Resign over Papua New Guinea Scandal.” *The Wall Street Journal*. Dow Jones & Company, 7 Mei, 2008. <https://www.wsj.com/articles/SB121012909623773089>.
- “Win-Win Cooperation for Common Development”. *Chinadaily*, 2006.

- http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-04/05/content_560611.htm.
- Brady, Anne-Marie. "Small Can Be Huge: New Zealand Foreign Policy in an Era of Global Uncertainty." *The World of Small States* 6 (2019): 1–10. doi:10.1007/978-3-030-18803-0_1.
- Brant, Philippa. "The Geopolitics of Chinese Aid." *Lowy Institute*, 6 Maret, 2015. <https://www.lowyinstitute.org/publications/geopolitics-chinese-aid>.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27-40. doi:10.3316/qrj0902027.
- Cheng-Chwee, Kuik. "The Essence of Hedging: Malaysia And Singapore's Response to A Rising China". *Contemporary Southeast Asia* 30, no. 2 (2008): 159-185. doi:10.1355/cs30-2a.
- Clark, Helen. "Full Text: Helen Clark's Statement to Parliament on Iraq." *New Zealand Herald*, 18 September, 2020. https://www.nzherald.co.nz/nz/ifull-texti-helen-clarks-statement-to-parliament-on-iraq/LHTS6WR4NKDGRF6PMNU66GNG7U/?c_id=1&objectid=3250841.
- Corbin, Juliet, dan Anselm Strauss. "Basics of Qualitative Research (3Rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory", 2008. doi:10.4135/9781452230153.
- Elder, Chris, dan Robert Ayson. *China's Rise and New Zealand Interests: A Policy Primer For 2030*. Victoria University of Wellington: Centre for Strategic Studies, 2012.
- Fergus Hanson, "The Dragon in the Pacific: More Opportunity than Threat," *Lowy Institute*, 3 Juni, 2008, <https://www.lowyinstitute.org/publications/dragon-pacific-more-opportunity-threat>.
- Hager, Nicky. "Principled Small Nation or Stalwart Ally? New Zealand's Independent Foreign Policy." *The World of Small States*, 2019, 363–77. doi:10.1007/978-3-030-18803-0_21.
- Henderson, John, dan Benjamin Reilly. "Dragon in Paradise: China's Rising Star in Oceania." *The National Interest*, no. 72 (2003): 94–105.
- Henderson, John T., Keith Jackson, dan Richard Kennaway. *Beyond New Zealand: The Foreign Policy of a Small State*. Auckland: Methuen, 1980.
- Hunter, Fergus, dan David Wroe. "New Zealand Opposed to Militarisation in The Pacific: Jacinda Ardern". *The Sydney Morning Herald*, 2018. <https://www.smh.com.au/politics/federal/new-zealand-opposed-to-militarisation-in-the-pacific-jacinda-ardern-20180410-p4z8pa.html>.
- Iati, Iati. "China's Impact on New Zealand Foreign Policy in the Pacific." *The China Alternative*, 2021, 143–66. doi:10.2307/j.ctv1h45mkn.8.
- Jackson, Robert H, dan Georg Sørensen. *Introduction to International Relations*. 5th ed. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Jennings, Ralph. "No Longer 'Hole of Asia-Pacific Doughnut', South Pacific Eyes China Trade Deal." *China, South Pacific Trade Talks Being Explored, and the Islands Want to Gauge China's 'Appetite,'* 15 Maret, 2023. <https://www.scmp.com/economy/china-south-pacific-trade-talks-being-explored-and-islands-want-gauge-chinas-appetite>.
- Key, John. Joint Statement between New Zealand and the People's Republic of China on the Establishment of a

- Comprehensive Strategic Partnership, 2014.
- Köllner, Patrick. "Australia and New Zealand Recalibrate Their China Policies." *Merics*, 8 Agustus, 2019. <https://merics.org/en/analysis/australia-and-new-zealand-recalibrate-their-china-policies>.
- Kumar, Ashna. "First Navy Woman Gets Chinese Scholarship in the Officer Ranks." *PressReader*, 11 September, 2018. <https://www.pressreader.com/fiji/fiji-sun/20180911/282020443188258>.
- Klan. "Pacific Nations Drowning in Chinese Debt." *The Australian*, 2018. <https://www.theaustralian.com.au/>.
- MFAT. "China." *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade*. 2023. <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/asia/china/>. Diakses 20 Januari 2023.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. "Li Keqiang Meets with Prime Minister Jacinda Ardern of New Zealand," 2019. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2797_665439/3412_664880/3414_664884/201911/t20191106_587128.html.
- Ministry of Defence of New Zealand. *Strategic Defence Policy Statement 2018*. Wellington: Ministry of Defence, 2018.
- New Zealand China Council. *Belt and Road Initiative: A Strategic Pathway*, 2018.
- Patton, Wonchibeni. "What Does China Gain from Its South Pacific Engagement?" *ICS Research Blog*, 26 November, 2021. <https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/>.
- Reitzig, Andreas. "The Contours of New Zealand Foreign Policy." *New Zealand and the World*, 2018, 393–409. doi:10.1142/9789813232402_0024.
- Shie, Tamara Renee. "China Woos the South Pacific." *Pacific Forum CSIS*, 17 Maret, 2006. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/pac0610a.pdf.
- Steff, Reuben, dan Francesca Dodd-Parr. "Examining the Immanent Dilemma of Small States in the Asia-Pacific: The Strategic Triangle between New Zealand, the US and China." *The Pacific Review* 32, no. 1 (2018): 90–112. doi:10.1080/09512748.2017.1417324.
- Shie, Tamara Renee. "Rising Chinese Influence in The South Pacific: Beijing's "Island Fever"". *Asian Survey* 47, no. 2 (2007): 307-326. doi:10.1525/as.2007.47.2.307.
- Szadziewski, Henryk. "How China's Presence Has Grown in The Pacific in The Past Decade". *The Jakarta Post*, 2022. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/07/12/how-chinas-presence-has-grown-in-the-pacific-in-the-past-decade.html>.
- Strategic Defence Policy Statement 2018. Wellington, New Zealand, 2018.
- The White House. *Indo-Pacific Strategy of The United States*. Washington, 2022.
- Thorhallsson, Baldur. "How Do Little Frogs Fly? Small States in the European Union". *The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Policy Brief*, 2015.
- Thorhallsson, Baldur, dan Sverrir Steinsson. "Small State Foreign Policy". *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017. doi:10.1093/acrefore/9780190228637.013.484.
- Walsh, Michael. "Pacific Leaders More Questioning of Chinese Influence." *Radio New Zealand*, 24 November, 2018. <https://www.rnz.co.nz/news/world/>

- 376732/pacific-leaders-more-questioning-of-chinese-influence.
- Walters, Laura. "PM Opposes Pacific Militarisation as China Eyes Vanuatu Military Base." *Stuff*, 10 April, 2018. <https://www.stuff.co.nz/national/politics/102971730/pm-opposes-pacific-militarisation-as-china-eyes-vanuatu-military-base>.
- Wesley-Smith, Terence. "China's Rise in Oceania: Issues and Perspectives". *Pacific Affairs* 86, no. 2 (2013): 351-372. doi:10.5509/2013862351.
- Wesley, Michael. "The Emerging Geopolitical Competition in Oceania". *The National Bureau of Asian Research (NBR)*, 2020. <https://www.nbr.org/publication/the-emerging-geopolitical-competition-in-oceania/>.
- Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979.
- Wroe, David. "China Eyes Vanuatu Military Base in Plan with Global Ramifications." *The Sydney Morning Herald*, 9 April, 2018. <https://www.smh.com.au/politics/federal/china-eyes-vanuatu-military-base-in-plan-with-global-ramifications-20180409-p4z8j9.html>.
- Xu, Erwen. "Remarks by Consul General Xu Erwen At Chinese New Year Dinner." *Consulate-General of the People Republic of China in Auckland*, 2018. http://auckland.china-consulate.gov.cn/eng/zlgxw/201801/t20180130_154878.htm.
- Young, Jason, dan Jake Lin. *The Belt and Road Initiative: A New Zealand Appraisal*. Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington, New Zealand Contemporary China Research Centre, 2018.
- Young, Audrey. "Jacinda Ardern Secures Upgrade on China Free Trade Deal." *NZ Herald*, 22 September, 2020. https://www.nzherald.co.nz/nz/jacinda-ardern-announces-upgrade-on-free-trade-agreement-with-china/BDWU3W46EM77W66UUCG5OQ43RM/?c_id=3&objectid=12281876.
- Zhang, Denghua. "US-China Rivalry Intensifies in The Pacific". *East Asia Forum*, 2022. <https://www.eastasiaforum.org/2022/04/16/us-china-rivalry-intensifies-in-the-pacific/>. Diakses 20 Juli 2022.
- Zhang, Denghua. "China in the Pacific and Traditional Powers' New Pacific Policies: Concerns, Responses and Trends." *Security Challenges* 16, no. 1 (2020): 78-93.
- Zhu, Zhiqun. "China and the South Pacific." Essay. Di dalam *China's New Diplomacy: Rationale, Strategies and Significance*, 139-40. New York: Routledge, 2017.